

beberapa perusahaan MNCnya. Bahkan James Connaughton, penasihat senior Presiden George W Bush mengenai lingkungan, berbalik menyerang negara anggota G8 lainnya dengan memberikan pernyataan, bahwa pertemuan G8 tidak seharusnya menjadi forum yang mendikte anggotanya. Berhubungan dengan itu pula dibahas stabilitas keamanan di Timur Tengah serta kondisi suplai minyak pada negara-negara G8, terutama dengan invasi militer AS di Irak yang berujung pada eksplorasi minyak bumi secara besar-besaran.

Ketegangan antara AS dan Rusia masih berlanjut di Heilgendam, hal ini berkaitan dengan pemepatan sistem rudal pertahanan AS di dua negara bekas negara komunis di Eropa Timur. Ceko dan Polandia. Presiden Rusia, Alexander Putin menolak program pertahanan AS tersebut karena dianggap akan mengancam keamanan negerinya. Sedangkan reaksi AS masih seperti biasa, mereka menolak untuk menghentikan program pertahanan tersebut. Tidak ingin terus tersinggung dengan program invasi Iraknya, AS berbalik membawa isu Kosovo ke meja pertemuan. Apalagi pada jamuan makan malam menjelang pertemuan resmi yang dihadiri oleh setiap pemimpin negara, Bush melontarkan kritik pada pemerintah Rusia dan mengeluarkan pernyataan bahwa Putin dianggap menghambat pemberdayaan warga negara Rusia yang berimplikasi pada proses pengembangan di negara tersebut. Nampaknya setelah pertemuan G8 ini ketegangan antara AS dan Rusia akan semakin memanas.

Sebelum berlangsung pertemuan puncak G8 di Heilgendam, terlebih dahulu diadakan beberapa pertemuan tingkat menteri G8 yang telah dimulai sejak awal tahun 2007. Penuntasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Afrika yang menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan puncak G8, telah dibicarakan sebelumnya ketika berlangsung pertemuan antar menteri keuangan G8 yang berlangsung di Postdam, 19 Mei 2007. Dalam *statement* yang dikeluarkan setelah pertemuan itu, G8 bekerja sama dengan AfDB (African Develop-

ment Bank) mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di Afrika terutama di negara-negara yang telah dan sedang mengalami konflik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong dengan membuka pasar dari investor industri yang hendak menanamkan modalnya di negara-negara Afrika termasuk di dalamnya program perbaikan infrastruktur yang mendukung masuknya modal. Dengan kata lain agenda neoliberal sedang melenggang di benua hitam.

Kemudian berkaitan pula dengan perbaikan lingkungan yang didengungkan oleh negara G8 terutama kaitannya di Afrika, salah satu program yang dilakukan untuk efisiensi itu ialah dengan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi nuklir. Untuk mewujudkannya selain akan memberikan pinjaman (baca: hutang) kepada negara-negara Afrika, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi energi diberikan keleluasaan untuk berinvestasi. Pada pertemuan puncak G8 di Heilgendam, program ini tidak lagi hanya sebagai proposal namun telah sampai pada persetujuan pemberian pinjaman oleh pemimpin negara G8. Karena itu dalam pertemuan di Heilgendam, enam presiden dari negara Afrika diundang untuk hadir.

Sebagai misionaris neoliberal, perilaku G8 tidak berbeda dengan institusi keuangan internasional semisal IMF atau WTO. Agenda yang dicanangkan mereka setiap tahunnya ialah membuka pasar sebesar mungkin di negara-negara berkembang. Dengan bantuan hutang yang diberikan, G8 melakukan intervensi terhadap negara penerima bantuan untuk memasukkan agenda pasar bebas agar diterapkan di negara tersebut. Dengan memaksakan perdagangan bebas, krisis pertanian, dan bebas Bergeraknya perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di manapun telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan.

Pertemuan G8 tahun ini sepakat untuk menggelontorkan dana sebesar AS \$60 miliar untuk menanggulangi kemiskinan, setengah dari jumlah tersebut dijanjikan oleh AS. Meski kesepakatan ini akan membantu mengatasi kemiskinan, tidak me-

meahkan persoalan kemiskinan. Negara-negara miskin yang terlilit utang yang sangat berat, Highly Indebted Poor Countries (HIPC) berjumlah 43 negara. Di samping itu, penghapusan utang, meskipun 100%, mensyaratkan negara-negara miskin tersebut menyelesaikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper/PRSP) yang memaksa negara-negara ini menerapkan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.

Dana yang dikeluarkan tersebut ialah hutang belum termasuk bunga yang dipinjamkan kepada negara-negara berkembang. Kemiskinan masih menjadi kendala serius, indikatornya setiap 3,5 detik seorang anak meninggal karena kelaparan di negara miskin. G8 berkilah bahwa masih begitu besarnya angka kemiskinan karena negara-negara penerima bantuan tidak dengan benar melakukan perbaikan sesuai dengan instruksi G8. Ketidakseriusan G8 untuk memerangi kemiskinan adalah bukti bahwa hutang yang mereka berikan hanyalah jebakan agar agenda neoliberal bisa mencapai setiap jengkal tanah di bumi.

Bertemunya 8 negara kapitalis raksasa ini bukanlah untuk memperbaiki ketimpangan di dunia ataupun membantu negara miskin. G8 tidak lebih dari bentuk representasi kapitalisme berselebung negara dan pemerintahan. Dalam setiap pertemuannya, G8 tidak hanya menghadirkan delapan negara kapitalis tadi, namun juga selalu mengundang puluhan ribu demonstran untuk berdemonstrasi menggalang kekuatan menghentikan pertemuan negara-negara yang mengaku sebagai pemimpin dunia ini.

Sebagaimana pertemuan-pertemuan institusi keuangan internasional lainnya, kongres G8 di Rostock, tanggal 6–8 Juni 2007, juga menghadapi demonstrasi besar-besaran di mana sekitar 30.000 orang terlibat di dalamnya. Dan sampai tengah malam 8 Juni, tercatat lebih dari 1500 demonstran ditangkap aparat, dan ribuan lainnya mengalami luka-luka karena tindak represif berlebihan dari aparat polisi. ★

PERANG KELAS YANG TERSEMBUNYI

Persoalan agraria memang belum berhenti, klaim tanah disertai kekerasan terhadap petani oleh perusahaan dan pemerintah terus berulang. Proyek SBY–JK tentang pemberian lahan secara gratis melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) sepertinya bukan jawaban atas persoalan tersebut. Konversi lahan pertanian menjadi pabrik, perkebunan negara dan pembangunan infrastruktur seakan biasa namun sebenarnya menciptakan banyak konflik dibaliknya. Terdapat ratusan atau ribuan kasus serupa yang telah terjadi, dari yang terberitakan seperti Pasuruan hingga yang tersembunyi seperti kasus di Banyuwangi. Namun terlepas dari terberitakan atau tidaknya konflik tersebut pelaku kekerasan dan korbannya masihlah sama. Ini adalah perang kelas yang tidak akan pernah berakhir.

Kasus Lengkong, Sukabumi

Di Lengkong Sukabumi semenjak tahun 1989 hingga tahun 1993 sebanyak 256 kepala keluarga petani Simpeunan mulai membuka lahan seluas 101 Ha bekas perkebunan milik Belanda yang terlantar. Warga memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan pemukiman dan lahan pertanian. Lalu pada tahun 1994 warga secara kolektif mengajukan permohonan kepemilikan untuk tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun permohonan ditolak karena berdasarkan data BPN lahan yang sampai hari itu dikelola oleh warga merupakan areal perkebunan PT JA Wattie yang hak guna usahanya dipegang oleh sebuah perusahaan perkebunan, The Kali Doeren Estate N.V, yang berakhir pada tahun 1998. Semenjak permohonan warga ditolak pihak perkebunan mulai melakukan intimidasi dan bekerjasama dengan pemerintah serta aparat keamanan untuk mulai mengusir para petani dari lahan garapannya. Dan seperti biasa, sesuai tradisi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyudutkan setiap protes, warga yang melakukan perlawanan dituding sebagai kelompok DI/TII bahkan PKI.

KRONOLOGI

10 Oktober 2006

Warga menerima surat dari Kepala Desa Kerta Jaya. Isinya menyatakan bahwa pihak perkebunan akan melakukan penerasan di lahan pemukiman warga, padahal proses legal belum selesai.

11 Oktober 2006

Warga didatangi seorang aparat Polsek Simpeunan utusan dari pihak perusahaan yang memberitahu bahwa hari itu akan dilaksanakan penerasan. Sebanyak 250 karyawan dan 42 polisi dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan penerasaan tersebut. Warga yang menolak dan melakukan protes tidak digubris oleh pihak kepolisian. Mereka hanya menyatakan bahwa penerasan telah disahkan oleh Bupati Sukabumi melalui suratnya. Karena aktivitas tersebut tanaman milik warga jadi rusak.

PETANI SUKABUMI VERSUS KORPORASI

12 Oktober 2006

Pada pukul 08.00 di blok Cikerud salah seorang karyawan perusahaan beserta 6 orang lainnya melakukan penerasan. Namun aksi tersebut diketahui oleh warga setempat yang lantas meminta mereka untuk segera menghentikan penerasan. Sementara warga yang lainnya berkumpul di blok Cikanere di mana sedang terjadi aktivitas penerasan. Warga yang berusaha menghentikan penerasan dihadap oleh barisan Dalmas. Terjadi aksi dorong mendorong, polisi yang berusaha menangkap seorang petani dihalangi-halangi oleh warga. Polisi melepaskan tiga tembakan peringatan untuk membubarkan massa, namun itu tidak membuat warga ketakutan dan malah membuat mereka semakin tidak terkendali. Dalam kericuhan tersebut seorang petani perempuan berhasil mengagalkan upaya penangkapan tiga tokoh warga tani oleh polisi dan sejumlah warga menghadang polisi yang berusaha memburu salah seorang warga. Tidak lama kemudian pimpinan kepolisian menarik pasukannya karena merasa kewalahan oleh aksi warga yang solid.

27 November 2006

3 orang petani Simpeunan mendapatkan surat panggilan dari PN Sukabumi. Pemanggilan itu terkait dengan perlawanan warga terhadap aksi penerasan yang dilancarkan oleh PT JA Wattie di atas lahan milik mereka.

30 November 2006

Kapolres Sukabumi menangkap ketiga orang petani SimpeunanAmas (40), Sarip (60) dan Saep (60) setelah sebelumnya mendapatkan surat panggilan. Pengadilan Negeri memvonis mereka 1 tahun penjara atas perjuangan mereka mempertahankan tanah.

31 Mei 2007

Setelah kasus seakan dibiarkan mengambang selama setengah tahun, mendadak kembali seorang warga Simpeunan ditangkap polisi Sukabumi saat sedang melakukan ibadah di dalam mesjid. Penangkapan tersebut dibarengi pemukulan, lantas diinjak, ditendang kemudian ditelanjangi.

Pasca penangkapan

Warga kembali memulai protesnya atas apa yang dilakukan polisi terhadap salah satu anggota warga Simpeunan tersebut. Pasukan Bri-mob juga mulai diturunkan untuk “mengamankan” situasi, tetapi toh bagaimanapun juga, warga, termasuk kaum perempuannya yang kini mengambil alih garda depan dalam aksi protes, bukanlah mereka yang pertama kali hadir menciptakan ketidakamanan. Hingga kini, perjuangan mereka masih berlanjut. ★



PO Box 1419, Bandung 40014
tim.apokalips@gmail.com
apokalips.org (-anization)

TIM REDAKSI:
Sumadikarta, Makhdum Ibrahim,
Rikki Rikardo, Bambang Setedjo,
Munaa, Petrus Soemitro, Ari
Wibowo, Ahmad Kosasih

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komuniti Melawan Neoliberalisme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komuniti-komuniti independen sebagai ikhtiar melawan gelombang imperialisme gaya baru yang semakin hari semakin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang membuat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin bertebaran di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin sedikit yang mampu mengaksesnya. Hidup jadi tak lebih dari sekedar menjadi urusan makan, minum, berkembang biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah kehilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kembali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.



NOMOR 07 – JULI 2007 | PERIODIKAL 2 BULANAN
GRATIS SEPERTI BUKU *HABIS MANIS* YANG DIBAGIKAN DI CENDANA SAAT ULTAH SUHARTO TANGGAL 8 JUNI



“Kenyataan terus menerus merusak hidupku.” –Calvin and Hobbes

Editorial

Awal bulan Juni lalu, di Rostock, Jerman, dilaksanakan sebuah pertemuan 8 negara-negara industri besar untuk memperluas ekspansi ekonominya ke seluruh penjuru dunia. Dari proyek pemberian hutang hingga program-program infrastruktur yang diajukan kepada para negara-negara penghutang—semua dibahas dalam pertemuan tersebut dengan dalih pengentasan kemiskinan melalui reformasi ekonomi, peningkatan iklim investasi. Apapun akan dilakukan demi menarik investor. Tak terkecuali dengan apa yang kemudian terjadi di Indonesia, demi reformasi ekonomi itulah, setelah tahun lalu para pekerja ditekan dengan revisi UU 13/2003, kini diterbitkanlah RUU Penanaman Modal yang tak kalah kontroversial. Privatisasi demi korporasi dilepas tanpa kendali. Di mana-mana dengan dikawal oleh barisan TNI dan polisi, pencaplokan tanah-tanah juga semakin sering terjadi. Dari Pasuruan di mana perjuangan melawan dominasi harus nyawa beberapa orang hingga konflik agraria di Sukabumi yang tak terberitakan di media resmi, semua seakan harus dibayar, demi kejayaan korporasi. Korporasi-korporasi yang sama yang dalam sejarah perjalanannya selalu menyimpan rentetan daftar kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang legal maupun ilegal. Mari berdo'a bagi yang telah mati dan berjuang habis-habisan bagi yang hidup. Kita bukan berjuang demi rakyat, tapi kita berjuang demi bertahan hidup, untuk membangun surga di atas bumi. ★

POPULASI VERSUS KORPORASI

PERJUANGAN MELAWAN (RANCANGAN) UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI PERJUANGAN GLOBAL MELAWAN DOMINASI KORPORASI

Maret lalu pebisnis lokal yang merangkap wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla, melakukan pertemuan khusus dengan Perdana Menteri Inggris, Lord Powell, untuk berbincang mengenai reformasi bisnis di Indonesia. Inggris adalah negara yang memiliki kepentingan sangat besar terhadap penanaman modal di Indonesia. Inggris sendiri sejak tahun 2005 memiliki sedikitnya 104 proyek di berbagai sektor dengan nilai investasi terbesar kedua di negeri ini setelah Singapura (www.jatam.org). Tapi Inggris tidaklah satu-satunya, Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank), Japan Bank for International Cooperation, semuanya secara bergantian mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Penanaman Modal (RUU PM) untuk mendorong reformasi bisnis di Indonesia. Lantas mengapa reformasi bisnis perlu dilakukan?

Latar Belakang Global

Di Indonesia, kemiskinan mencapai angka 17.75% dari populasi sejumlah 222 juta jiwa (www.liputan6.com), sementara pengangguran mencapai 10.4% dari seluruh tenaga kerja produktif di Indonesia (www.tempointeraktif.com). Tidak hanya di Indonesia, di Bolivia, hanya sekitar 400.000 orang yang memiliki pekerjaan formal—dari seluruh populasi sejumlah 8.8 juta jiwa. Di Malawi, 50.000 dari populasi sejumlah 12 juta jiwa. Di Mozambique, 350.000 dari 20 juta jiwa populasi (*Doing Business 2007 Full Report*). Daftar pengangguran di tingkat global ini semakin panjang apabila diiberkan secara keseluruhan, dan tentu hal ini juga berimbas pada semakin tingginya angka kemiskinan ekonomi di tengah masyarakat—yang pada gilirannya akan berimbas pada tingginya angka kriminalitas dan kekacauan sosial lainnya.

Bagi Bank Dunia, semua hal di atas dapat ditanggulangi dengan cara mereformasi bisnis, dengan mempermudah bisnis-bisnis formal untuk membuka usaha-usaha barunya, yang tentu akan berarti terbukanya semakin banyak lapangan pekerjaan. Atas hal tersebut, menurut mereka, yang paling mendapatkan

keuntungan adalah perempuan dan pekerja muda—kedua kelompok sosial inilah yang menempati posisi terbanyak dari setiap tabel angka pengangguran. Atau dengan kata lain, untuk mengatasi semua masalah di atas, keran-keran investasi harus dibuka besar-besaran, karena hanya dengan cara tersebutlah maka bisnis-bisnis akan dapat berkembang bebas.

Dalam laporan Bank Dunia tentang iklim bisnis global, *Doing Business 2007*, Singapura menempati ranking pertama sebagai negara yang paling ramah terhadap pembukaan keran investasi, sementara Indonesia yang menempati ranking 131 di tahun 2006, tahun ini turun ke ranking 135. Hal ini dianggap preseden buruk bagi pemerintah Indonesia dalam kancah ekonomi internasional.

Atas dasar tersebut di ataslah maka RUU PM hadir di Indonesia, yang sesungguhnya di pertengahan awal tahun ini rencananya telah disahkan. Melihat hal ini jelas bahwa, berbeda dengan pandangan publik rata-rata, yang menyatakan bahwa RUU PM sekedar hadir atas kepentingan asing belaka: ini adalah perlombaan ekonomi tingkat internasional—di mana pertentangannya *bukanlah* antara korporasi lokal versus korporasi asing, melainkan perjuangan global antara populasi versus korporasi.

Fitur-Fitur dalam RUU PM

Fitur kunci dalam RUU PM ini adalah adanya kemudahan di bidang perpajakan bagi para investor. Investor asing juga akan mendapatkan kemudahan terutama apabila ia berpartner dengan pebisnis lokal. Fasilitas yang memudahkan ini juga ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di area-area pedesaan dan pinggiran, untuk mengembangkan industri-industri inovatif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. RUU PM di sisi lain juga memperbolehkan penggunaan tenaga kerja profesional asing apabila beberapa kemampuan tak ditemukan di kalangan pekerja lokal, juga pemberian kebebasan bagi perusahaan untuk bergerak di sektor ekonomi apa-

pun dan diberikan jaminan bahwa pemerintah tak akan melakukan nasionalisasi.

RUU PM juga sangat permisif dalam soal-an akuisisi lahan, di mana ijin penggunaan yang awalnya berjangka 60 tahun akan diperpanjang hingga 95 tahun. Untuk memfasilitasi kesuksesan investasi, pemerintah juga dapat mengarahkan para investor ke dalam Zona Ekonomi Khusus—area di mana birokrasi dan fasilitas disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Hanya industri-industri berkaitan dengan urusan pertahanan yang tertutup bagi para investor, sementara sisanya dibuka luas. Dalam parameter yang luas tersebut, para investor diberi jaminan kemudahan pajak pendapatan, penurunan berbagai bea impor-ekspor bagi mesin-mesin berat dan bahan mentah, serta penurunan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan atau sewa lahan dan bangunan.

Dampak-Dampak

Dengan berbagai aturan seperti yang diterangkan di atas, jelas, bahwa hal tersebut akan mendorong privatisasi besar-besaran di segala bidang, termasuk dalam bidang-bidang yang menunjang kebutuhan hidup mendasar manusia: seperti kepemilikan air bersih dan tanah, dan tentu akan berujung pada komodifikasi di segala bidang (*Pasal 2 Draft RUU PM*).

Berbagai masalah persoalan yang ditimbulkan akibat beroperasinya para investor melalui korporasinya tidak akan dianggap sebagai kejahatan selama hal tersebut dilakukan atas nama pertumbuhan ekonomi; satu-satunya tindak kejahatan korporasi menurut RUU PM adalah apabila korporasi tersebut tidak menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modalnya kepada instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan penanaman modal—dan itupun hanya akan mendapatkan sangsi administratif (*Pasal 18 Draft RUU PM*).

Lanjut ke halaman berikut ➞

Lanjutan dari halaman sebelumnya 👉

Sangat kontras dengan alasan dasar lahirnya RUU PM ini yang memberi fokus bagi ketersediaan lapangan kerja bagi perempuan dan pekerja muda di area-area didirikannya korporasi, persoalan ketenagakerjaan sama sekali tidak menjadi fokus dalam RUU PM ini, ditambah adanya kemudahan untuk meng-gunakan tenaga profesional asing untuk jabatan dan keahlian tertentu (*Pasal 10 Draft RUU PM*); yang tentu mengingat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari standar di negara-negara industri maju, tentu kor-porasi tak akan memberikan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi penduduk setempat.

Belum lagi pasal-pasal lainnya yang memang pada garis be-sarnya, hanya menguntungkan para investor, melindungi kepenting-an para investor semata. Persis seperti yang dipaparkan oleh Dian-kov melalui salah satu makalah bulan November 2006 berjudul *The Law and Economics of Self-Dealing* yang diajukan dalam penentuan ke-bijakan Bank Dunia untuk keperluan penyusunan aturan-aturan hu-kum yang selanjutnya akan diaplikasikan pada negara-negara seperti Indonesia, khususnya dalam persoalan pemberian perlindungan bagi para investor—yang tak menyoroti sama sekali persoalan perlin-



Bayer AG (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai Bayer saja) adalah sebuah korporasi raksasa asal Jerman yang didirikan pa-da tahun 1863 di kota Wuppertal, Jerman, oleh seorang pedagang bahan celup, Friedrich Bayer (1825–1880), dan partnernya Johann Friedrich Weskott (1821|1876). Pada awalnya, Bayer didirikan hanya sebagai pabrik kecil yang bertujuan untuk memanufaktur sekaligus memperdagangkan bahan-bahan celup sintetis. Namun kini Bayer sudah beroperasi di hampir semua negara di dunia dengan perkem-bangan operasinya yang secara umum terbagi atas empat sektor bes-ar industri, yaitu: kesehatan (farmasi), pertanian (bibit dan *agro-chemicals*), *polymer* (plastik, karet sintetis, *coating*) dan industri kimiawi (materi-materi kimiawi dasar serta materi-materi kimiawi khusus). Bayer di Indonesia bekerja dalam tiga sektor utama: *Health Care*, *Material Science*, dan *Crop Science*. Produk-produk Bayer yang dapat kita jumpai di Indonesia kebanyakan adalah produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, di antaranya: Tonikum Bayer®, As-pirin®, Bepanthen®, Canesten®, CDR®, Redoxon® Double Act-ion, Saridon®, Supradyn®, dll.

Sebagai pemain utama dalam empat sektor besar selama lebih dari 125 tahun, Bayer memiliki sejarah yang penuh dengan kontro-versi, sebut saja: produksi besar-besaran serta perdagangan atas be-berapa jenis obat-obatan yang kemudian menjadi kontroversi (he-roin, ciproxin dan baycol); menjadi pengembang senjata kimia dan racun (gas Khlor, gas Mustard, Zyklon B, VX, dll); praktek perbudak-an selama Perang Dunia II; serta beberapa kasus keracunan, kemati-an, efek samping berbahaya dan kerusakan lingkungan akibat lim-bah dari pabrik-pabrik kimia dan farmasinya. Pada tahun 2001, *Mul-tinational Monitor* mencatat Bayer dalam daftar Sepuluh Perusahaan Terburuk Tahun 2001[1], dan pada tahun 2003 Bayer berhasil men-duduki peringkat pertama[2].

Beberapa produk awal Bayer meliputi: Antinonin (pestisida sintetis, 1892), Aspirin (1897), Heroin (1898) dan Buna (karet sinte-tis, 1915). Selama masa Perang Dunia I, Bayer dan korporasi kimiawi Jerman lainnya mulai tertarik untuk memproduksi senjata kimia[3], di antaranya adalah gas Khlor dan gas Mustard [4].

Bayer dalam Holocaust [5]

Sebagai reaksi atas krisis ekonomi yang melanda Jerman akibat

dungan terhadap para pekerja pada khususnya dan populasi pa-da umumnya.

Fenomena Global

Tidak hanya di Indonesia, ternyata hukum serupa RUU PM ini juga dipaksakan hadir di negara-negara lain walau dengan nama yang berbeda-beda. Dalam laporan Bank Dunia, *Doing Business 2007*, tercatat Serbia dan Uganda juga telah mulai menerapkan hukum serupa dengan mempermudah aplikasi bagi para inves-tor. Bulgaria telah mengesahkan hukum semacam ini pada bulan April 2006, mengesampingkan protes keras dari penduduknya dan kelompok-kelompok oposisi. Honduras dan Italia telah memindahkan persoalan perjinan dari urusan hukum menjadi urusan badan ekonomi nasional. Bosnia Herzegovina, Republik Czechnia, Romania dan Slovakia yang kini masih menempatkan urusan investasi ini sebagai urusan hukum, tercatat mulai mem-berikan pembuatan aturan ini pada ekonom-ekonom nasional-nya masing-masing.

Dalam laporan tersebut juga dipaparkan bagaimana di Ser-bia, yang selama 2 tahun RUU PM mendapat berbagai penolak-an, yang juga diperparah dengan dibunuhnya Perdana Menteri Zoran Djindjic yang mendukung kebijakan tersebut, pada ak-hirnya berhasil disahkan di tahun 2007 ini. Slovakia juga akhirnya berhasil melakukan reformasi bisnis dengan mengesahkan UU serupa yang diperjuangkan sejak Oktober 2003. Selama ren-tang tahun 2003 hingga 2005, juga tercatat 8 negara melaku-kannya—Burkina Faso, Kroasia, El Salvador, Guatemala, Li-thuania, FYRMakedonia, Portugal dan Ukraina.

Di mana-mana, penentangn terhadap aturan semacam RUU PM ini terjadi. Dan di negara-negara tersebut di atas, ke-menangan berada di tangan korporasi. Kini giliran Indonesia, di mana sang pemenang masih belum ditentukan, kesempatan un-tuk mengalahkan imperium korporasi dalam satu front pertem-puran ini masih ada selama RUU PM belum disahkan. Dan itu semua ada di tangan kita sendiri. Hidup kita, masa depan kita dan generasi setelah kita, kini ada di tangan kita sendiri. ★

Bedah Kejahatan Korporasi:

Sejarah Sang Penjahat Perang

"Fasisme seharusnya lebih cocok disebut korporatisme karena ia adalah sebuah gabungan dari negara dan kekuasaan korporasi."
—Benito Mussolini, pemimpin Fasis Italia

kekalahannya dalam Perang Dunia I, pada tahun 1925 Bayer bersama beberapa korporasi industri kimia Jerman lainnya se-perti BASF, AGFA, Hoechst, Cassella, Chemische Werke Hüls, Chemische Fabrik Kalle, dll, membentuk sebuah sindikat raksasa yang bernama Interessens-Gemeinschaft Farbenindustrie AG[6] (dalam bahasa Inggris: *"syndicate of dyestuff corpora-tions"*). Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai IGF sa-ja). Berkat hubungannya yang sangat dekat dengan rezim *Natio-nal Socialist* (Nazi), akhirnya IGF mampu memonopoli seluruh produksi bahan-bahan kimiawi di Jerman. Mereka mulai men-ciptakan sekaligus memproduksi Zyklon B secara besar-besar-an. Zyklon B sendiri adalah gas mematikan yang kemudian diuji-cobakan selama masa Holocaust di dalam kamar-kamar gas pa-da beberapa kamp konsentrasi, tempat pembantaian atas juta-an tawanan Yahudi [7].

Bukan hanya itu saja, bahkan IGF pun ikut terlibat dalam merancang invasi atas Polandia pada tahun 1939, sebuah invasi yang kemudian memicu terjadinya Perang Dunia II. Di tengah perancangan invasi Jerman-Nazi [8] atas Polandia, IGF bekerja sama dengan para pejabat tinggi Nazi menunjuk lokasi pabrik mana saja yang harus direbut untuk kemudian diserahkan ke-pada IGF. Timbal baliknya, IGF mengucurkan dana secara besar-besaran kepada militer Nazi. Hal itu merupakan bentuk kerja-sama yang dilakukan antara Jerman-Nazi dengan IGF. Setelah invasi atas Polandia, Bayer bersama IGF sebagai konglomerasi di bidang kimiawi paling terkemuka di Jerman, mulai memper-lebar sayapnya dengan cara merebut pabrik-pabrik kimia yang berada di sepanjang tanah jajahan Nazi di Eropa, dan member-lakukan kerja-paksa di dalam pabrik-pabrik tersebut di bawah pengawasan pasukan Nazi. Pada pintu gerbang setiap pabrik, IGF memasang papan bertuliskan *“kerja akan membebaskan-mu”*. Papan tersebut adalah kebohongan pesan-kampanye ter-besar dalam sepanjang sejarah manusia, kecuali kita mendefini-sikan kata “bebas” sebagai “mati karena lelah”.

Bayer dan Auschwitz: Perbudakan

Pada tahun 1940, Jerman-Nazi mulai membangun kamp kon-sentrasi terbesarnya, kamp Auschwitz, di Polandia Selatan. Komplek kamp konsentrasi tersebut terbagi atas tiga kamp utama: Auschwitz I, kamp yang dibangun pertama kali dan ke-mudian digunakan untuk berbagai keperluan administratif, se-kaligus tempat dimana sebanyak 70.000 tawanan perang Po-



Sejarah Singkat G8

Diawali tahun 1973 ketika diadakannya pertemuan yang diikuti oleh empat menteri keuangan dari negara AS, Inggris, Prancis, dan Jerman Barat di ruang perpustakaan Gedung Putih (lazim disebut sebagai Library Group), Washington DC. Apa yang di-bahas pada saat itu ialah mengenai situasi perekonomian global yang ditengarai menuju krisis—pengangguran, inflasi, dan krisis minyak pertama—sehingga sebagai empat negara kapitalis rak-sasa mereka berembuk untuk mencari cara keluar dari krisis dan melindungi modal di tengah goncangan ekonomi. Perte-muan ekonomi itu kemudian berkembang menjadi pertemuan rutin yang membentuk G6 (Group of Six) di tahun 1975, dengan mengikutsertakan Italia dan Jepang. Satu tahun kemudian atas

desakan AS, Kanada akhirnya masuk dan selanjutnya menjadi G7 (Group of Seven). Masuknya Kanada didasarkan atas sikap antisipasi AS untuk mengimbangi pengaruh kepentingan per-ekonomian Eropa dalam pengambilan keputusan. Berakhirnya Perang Dingin dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, dan kemudian berubahnya peran ekonomi Rusia menjadi salah satu kekuatan sistem kapitalisme global. Delegasi Rusia mulai ikut dalam pertemuan G7 ketika diadakannya per-temuan di Napoli tahun 1994. Setelah pertemuan utama pada saat itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan khusus antara Delegasi Rusia dengan para pemimpin negara G7. Atas inisiatif Presiden AS, Bill Clinton, tahun 1997 Rusia secara resmi dite-rima sebagai bagian dari grup tersebut, walaupun pada saat itu

masih ada juga eksperimen untuk mengatasi penyakit kolera, tifus, hing-ga sakit kuning. Eksperimen obat-obatan tersebut akan tampak biasa saja apabila kita melihat eksperimen lainnya. Sejak April 1943 hingga Mei 1944, seorang dokter Auschwitz bernama Prof. Dr. Carl Clauberger menguji coba efek dari beberapa cairan keras kimia di dalam rahim dengan cara menyuntikkannya langsung ke dalam ra-him para tawanan perempuan. Banyak yang meninggal di tengah-tengah eksperimen ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh seorang dokter Auschwitz lainnya, Dr. Josef Mengele, yang kemudian terkenal dengan se-butan “sang Malaikat Maut”. Dr. Mengele sangat terkenal karena eksperimennya terhadap anak-anak kembar dan orang-orang ce-bol. Seorang mantan tawanan Auschwitz yang berhasil bertahan hidup, Vera Alexander, memberikan kesaksian tentang sepasang anak kembar berumur empat tahun bernama Guido dan Ina. Suatu hari Dr. Mengele membawa mereka, dan mereka kembali dengan keadaan yang sangat mengerikan: kedua tubuh mereka dipersatakan dengan cara dihajit punggungnya, seakan-akan hendak dijadikan kembar siam. Luka mereka terinfeksi dan terus menerus mengeluarkan darah, Mereka menangis dan berteriak-teriak hingga malam. Kemudian mereka dibunuh [12].

Eksperimen Dr. Mengele lainnya termasuk menempatkan tawanan ke dalam ruang bertekanan tinggi; menguji coba berba-gai obat-obatan IGF pada para tawanan; merendam tawanan da-lam air es selama berjam-jam untuk menguji coba serum anti-be-ku; eksperimen dengan otopsi, amputasi dan implantasi tanpa bius. Ia juga sangat terkenal dengan risetnya menciptakan manu-sia ras unggul berbambut pirang dan bermata biru. Salah satu cara-nya adalah dengan cara menyuntikkan beragam bahan kimia ke dalam bola mata anak-anak Yahudi [13]. Seluruh bahan-bahan kimia dan obat-obatan yang digunakan oleh Dr. Mengele dalam setiap eksperimennya adalah buatan langsung dari Bayer dan Ho-echst.

Pasca Perang Dunia II

Atas berbagai kejahatannya selama Perang Dunia II, IGF dianggap tidak layak untuk beroperasi. Pada tahun 1945, ditanda-tangani sebuah perjanjian, yaitu Kesepakatan Potsdam, menuntut dibubarkannya IGF. Sindikat raksasa ini akhirnya dilikuidasi [14] pada tahun 1951 dan pecah menjadi empat korporasi besar: Ba-yer, AGFA, BASF, dan Hoechst (sekarang bernama Aventis). Ba-yer sendiri dibentuk ulang menjadi *Farbenfabriken Bayer AG* dan kemudian mengubah namanya menjadi Bayer AG pada tahun 1972 hingga sekarang.

Pada tanggal 29 Juli 1948, Pengadilan Perang Nurembourg memvonis hukuman penjara atas dua belas eksekutif IGF sebagai penjahat perang, dengan tuduhan keterlibatannya dalam berba-gai praktek pembunuhan massal, perbudakan dan berbagai pe-langgaran HAM lainnya selama Holocaust. Hukuman penjara ter-bebat yang dijatuhkan oleh pengadilan hanyalah kurungan penja-ra selama tujuh tahun. Hukuman tersebut dijatuhkan pada Dr. Fritz ter Meer, seorang eksekutif utama sekaligus ilmuwan IGF

Rusia tidak selalu diikutsertakan dalam setiap pertemuan ting-kat menteri keuangan, dengan alasan perekonomian Rusia yang belum semaju negara anggota lainnya, sehingga nama grup itu pun masih disebut G7 plus 1. Semakin terintegrasinya Rusia da-lam sistem perekonomian kapitalis dengan menanggalkan sega-la atribut komunisnya, Rusia bisa bersanding sejajar dengan ne-gara-negara kapitalis lainnya, dan mengubah “G7 plus 1” men-jadi G8 (Group of Eight) sampai sekarang.

Kelompok G8 (Group of Eight) adalah forum internasional yang beranggotakan Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, Je-pang, Inggris, dan Amerika Serikat. Delapan negara itu merupa-kan pemegang kendali atas 65% perekonomian dunia. G8 bu-kanlah sebuah organisasi formal yang terstruktur seperti IMF ataupun WTO. Penanggung jawab forum G8 berubah setiap ta-hunnya, untuk tahun 2007 dipegang oleh Jerman, dan mulai Ja-nuari 2008, Jepang yang memangku beban penanggung jawab. Forum ini mengadakan berbagai konferensi sepanjang tahun dan penelitian terhadap berbagai kebijakan terutama di bidang ekonomi. Hasil kegiatan tersebut akan digulirkan pada pertemu-an pemimpin negara anggota, yang juga menghadirkan per-wakilan Uni Eropa. Sejak pertemuan tahun 2005 di Gleneagles, Skotlandia, forum G8 mengadakan pertemuan lain yang berbe-da dengan mengikutsertakan 5 negara industri besar lainnya, yakni Cina, India, Mexico, Brazil, dan Afrika Selatan. Pertemuan forum ini sering disebut sebagai “G8 plus 5”.

Landasan utama dibentukknya forum G8 ialah agenda pe-laksanaan pasar bebas yang diberlakukan di seluruh dunia. Sta-bilitas ekonomi yang harus terjamin demi terlaksananya pasar bebas menjadi peran utama yang terus diemban oleh setiap anggota dan menjadi agenda pokok dalam setiap pertemuannya. Tidak berbeda dengan IMF atau Bank Dunia, yang meng-hendaki pertumbuhan ekonomi secara global, forum ini dilan-dasi oleh hal tersebut namun yang berbeda ialah cukup kental-nya supremasi politik dan negara dalam agenda yang dibawa-nya. Satu hal yang harus dicatat bahwa dalam setiap pertemuannya, setiap negara membawa agendanya masing-masing dengan kepentingan yang berbeda. Hal ini tentu saja terkait dengan ke-

pentingan ekspansi ekonomi dari setiap negara yang di dalam-nya terdapat puluhan perusahaan multinasional bernaung.

Pertemuan G8 ke-33 di Jerman

Tahun ini pertemuan puncak G8 ke-33 mengambil tempat di Kempinski Grand Hotel di kota Heiligendamm wilayah Meck-lenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Jerman bagian Utara, dari 6 Juni hingga 8 Juni 2007. Heiligendamm adalah sebuah tempat wisata yang dibangun sejak abad ke-18 dan menjadi tempat per-istirahatan raja-raja Prusia.

Isu lingkungan hidup, terutama pemanasan global dan pe-ngurangan emisi gas buang, memang menjadi sorotan utama pertemuan G8 kali ini. Pemberian hutang bagi penuntasan ke-miskinan di Afrika juga menjadi tujuan utama yang dibahas. Se-lain itu tentu saja perdagangan bebas dibahas dalam pertemuan ini. Agenda pelaksanaan perdagangan bebas tidak ditulis sebagai agenda utama karena pembahasan tersebut telah menjadi ba-hasan rutin dan suatu keharusan untuk dibicarakan dalam setiap pertemuan G8 dan pertemuan institusi keuangan internasional lainnya.

Pengurangan emisi CO2 yang berakibat pada pemanasan global dibahas dalam pertemuan ini. Kanselir Jerman, Angela Mekkel membawa upaya pengurangan emisi dalam agenda penting yang dibicarakan. Ia berusaha membujuk negara-ne-gara industri maju lainnya guna memotong emisi sebesar 50 persen sebelum tahun 2050. Sungguh waktu yang panjang un-tuk hanya memberi sedikit napas bagi bumi yang kian hari kian memburuk kondisinya. Selain itu ia mengajukan peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar sebesar 20 persen, agar sedikitnya mengurangi pemanasan suhu bumi. Program ini adalah kelanjutan Protokol Kyoto yang melahirkan kesepakatan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang disebabkan industrialisasi yang memakai bahan bakar fosil secara besar-besaran.

Namun pemerintah AS, Bush, menolak untuk mendukung program tersebut, hal ini berkaitan dengan masih terlalu besar-nya kepentingan AS di banyak negara ketiga melalui investasi



66.

[7] Antony C. Sutton, 1976. *Wall Street and the Rise of Hitler*. Dalam chapter 2: *“The Empire of IG Farben”*. Lihat juga *Ger-many: Farben to Create Slave Labor Fund*, Associated Press, 2000.

[8] “Jerman-Nazi” atau *Third Reich*, mengacu pada kekuasaan bangsa Jerman antara tahun 1933–1945 ketika diperintah oleh kediktatoran partai Nazi.

[9] *Anatomy of the Auschwitz Death Camp*, Indiana University Press, 1994, hlm 17.

[10] Laporan personal mengenai bagaimana seorang ahli kimia Yahudi dipekerjakan secara paksa untuk IGF, baca *Surviving Auschwitz* atau oleh Primo Levi.

[11] Brian Ross, 2000. *Headaches for Bayer: Auschwitz Survivor says Pharmaceutical Giant Aided Nazis* oleh Lihat juga *Ger-many: Farben to Create Slave Labor Fund*, Associated Press, 2000.

[12] Michael Berenbaum, *The World Must Know*, US Holocaust Memorial Museum, hlm 194–195

[13] Marilyn Harran, Louis Weber, 2000. *The Holocaust Chro-nicles, A History in Words and Pictures*, hlm 384.

[14] Walaupun telah dilikuidasi secara resmi, saham IGF masih tetap diperdagangkan di *Frankfurt Stock Exchange* dan me-nguasai aset beberapa *real estate* hingga tahun 2003. http://en.wikipedia.org/wiki/IGF_Farben

[15] Winin Pereira and Jeremy Seabrook, 1994 *Global Parasites, Five Hundred Years of Western Culture*, Earthcare Books, hlm 137–138.

[16] Jenny Miller, January, 1992. *Bayer Buys Ber-keley*, Z Maga-zine, hlm 23.

[17] http://boycot.port5.com/foodendrug/food_doc/Hoechst.htm

[18] *Auschwitz: 60 Year Anniversary: the Role of IG Farben-Bayer*, dalam <http://www.dhrp.org/>

[19] <http://home.earthlink.net/~alto/bayer.html>

